

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aria Zurnetti, 2020, *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Depok : PT RajaGrafindo Persada.
-, Aria Zurnetti, dkk, *Diktat Hukum Pidana*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Azmi Djamarin dan Yardi Goad, *Perbuatan dan Sanksi Adat yang Masih Hidup dalam Hukum Adat Minangkabau Dewasa ini*, Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian dalam Praktik*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Erdianto Effendi, 2018, *Hukum Pidana Adat*, Bandung : PT Refika Aditama
- Hilman Hadikusuma, 1984, *Hukum Pidana Adat*, Bandung : Penerbit Alumni Bandung.
- Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, 2019, *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, Bukittinggi : Kristal Media
- I Dewa Made Suartha, 2015, *Hukum dan Sanksi Adat*, Malang : Setara Press
- I Made Widnyana, 1993, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Bandung : PT Eresco.
- I Made Widnyana, 2013, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta : PT Fikahati Anesta.
- Leden Marpaung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi, 2015, *Hukum Pidana Adat*, Bandung : Penerbit PT Alumni
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2010, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bhakti.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Rianto Adi, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit.
- Soerjono Soekanto, 2009, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Penerbit Pustaka Yustisia.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan TindakanTindakan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

Keputusan Kerapatan Adat Nagari Guguk Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam Sumatera Barat pada tanggal 10 April 2015.

C. Jurnal

Ali Abubakar, *Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana dengan Hukum Adat*, Jurnal Madania Vol. 18 No. 1, Juni 2014.

Aryo Subroto, *Peran Negara Dalam Menjaga Eksistensi Masyarakat Hukum Adat*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Vol. XII No.2, Tahun 2013.

Elwi Danil, *Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Jurnal Konstitusi Vol.9, 3 September 2012.

Herlambang P. Wiratraman, *Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat*, Mimbar Hukum, Vol. 30, No. 3, Oktober 2018.

Irzal Rias, *Customary Crime Settlement Based on the Adat Law of Minangkabau: A Criminological Study*, SAVAP Academic Research International Vol. 5(2) Maret 2014.

....., *The Effect of Policy of Rural Administration on Customary Villages; Experience of Rural Administration in West Sumatera Indonesia*, SAVAP Academic Research International Vol.6(3) Mei 2015.

Reny H. Nendissa, *Eksistensi Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Hukum Sasi Laut di Maluku Tengah*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4, Oktober-Desember 2010.



A. Buku

Aria Zurnetti, 2020, *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Depok : PT RajaGrafindo Persada.

....., Aria Zurnetti, dkk, *Diktat Hukum Pidana*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Azmi Djamarin dan Yardi Goad, *Perbuatan dan Sanksi Adat yang Masih Hidup dalam Hukum Adat Minangkabau Dewasa ini*, Padang :Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian dalam Praktik*, Jakarta : Sinar Grafika.

Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.

Erdianto Effendi, 2018, *Hukum Pidana Adat*, Bandung : PTRefika Aditama

- Hilman Hadikusuma, 1984, *Hukum Pidana Adat*, Bandung : Penerbit Alumni Bandung.
- Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, 2019, *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, Bukittinggi : Kristal Media
- I Dewa Made Suartha, 2015, *Hukum dan Sanksi Adat*, Malang : Setara Press
- I Made Widnyana, 1993, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Bandung : PT Eresco.
- I Made Widnyana, 2013, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta : PT Fikahati Anesta.
- Leden Marpaung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2015, *Hukum Pidana Adat*, Bandung : Penerbit PT Alumni
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2010, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bhakti.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Rianto Adi, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit.
- Soerjono Soekanto, 2009, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Penerbit Pustaka Yustisia.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Tindakan-Tindakan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.
- Keputusan Kerapatan Adat Nagari Guguk Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam Sumatera Barat pada tanggal 10 April 2015.

C. Jurnal

- Ali Abubakar, *Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana dengan Hukum Adat*, Jurnal Madania Vol. 18 No. 1, Juni 2014.
- Aryo Subroto, *Peran Negara Dalam Menjaga Eksistensi Masyarakat Hukum Adat*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Vol. XII No.2, Tahun 2013.
- Elwi Danil, *Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Jurnal Konstitusi Vol.9, 3 September 2012.
- Herlambang P. Wiratraman, *Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat*, Mimbar Hukum, Vol. 30, No. 3, Oktober 2018.

- Irzal Rias, *Customary Crime Settlement Based on the Adat Law of Minangkabau: A Criminological Study*, SAVAP Academic Research International Vol. 5(2) Maret 2014.
-, *The Effect of Policy of Rural Administration on Customary Villages; Experience of Rural Administration in West Sumatera Indonesia*, SAVAP Academic Research International Vol.6(3) Mei 2015.
- Reny H. Nendissa, *Eksistensi Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Hukum Sasi Laut di Maluku Tengah*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4, Oktober-Desember 2010.

